


## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur senantiasa kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Kabupaten Pinrang Tahun 2023 telah selesai disusun sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara, Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial merupakan dokumen perencanaan yang disusun selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pinrang yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Penyusunan Renja Dinas Sosial Tahun 2023 menjadi dasar acuan pelaksanaan kinerja program dan kegiatan Dinas Sosial Tahun 2023.

Pada kesempatan ini, perlu kami sampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang mendukung atas tersusunnya Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Kabupaten Pinrang Tahun 2023, yang telah memberikan waktu, pikiran dan tenaga sehingga Renja ini dapat terselesaikan dengan baik. Kritik dan saran senantiasa kami harapkan untuk perbaikan dan penyempurnaan, dan semoga dokumen Renja Dinas Sosial Kabupaten Pinrang Tahun 2023 ini dapat memberikan manfaat sebagaimana mestinya.

Pinrang, 29 Juli 2022

  
Kepala Dinas Sosial  
**RUSLI, S.Sos**  
Pangkat : Pembina Tk.I  
NIP : 19651231 198903 1 109

## **DAFTAR ISI**

### **KATA PENGANTAR**

### **DAFTAR ISI**

#### **BAB I PENDAHULUAN**

- I.1. Latar Belakang
- I.2. Landasan Hukum
- I.3. Maksud dan Tujuan
- I.4. Sistematika penulisan

#### **BAB II HASIL EVALUASI RENJA DINAS SOSIAL TAHUN LALU**

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Sosial Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Sosial
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Sosial
- 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Sosial
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

#### **BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS SOSIAL**

- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Sosial
- 3.3. Program dan Kegiatan

#### **BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS SOSIAL**

#### **BAB V PENUTUP**

# BAB I P E N D A H U L U A N

## 1.1. LATAR BELAKANG

### a. Pengertian Renja Dinas Sosial

Renja Dinas Sosial Kabupaten Pinrang Tahun 2023, adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun mendatang yang memuat program, kegiatan, lokasi serta kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan/anggaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Pinrang di Bidang Sosial. Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2023 secara substansi merupakan penjabaran tahun ke 5 (lima) RPJMD Periode 2019-2024. Secara umum muatan RKPD Tahun 2023 diarahkan pada pencapaian visi dan misi sebagaimana tercantum di dalam RPJMD, dengan Visi Kabupaten Pinrang "***Terwujudnya masyarakat Pinrang Yang sejahtera, Religius, Harmonis, Mandiri dan Tangguh mengelola potensi daerah***" yang dijabarkan kedalam 7 Misi sebagai berikut :

1. Memantapkan sistem birokrasi yang baik dan akuntabel serta berorientasi pelayanan prima dengan didukung oleh teknologi informasi dan komunikasi;
2. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui optimalisasi pelayanan pada bidang pendidikan dan kesehatan;
3. Memperkuat peran lembaga sosial-kemasyarakatan dalam pembangunan daerah secara umum dan pembentukan karakter masyarakat secara khusus;
4. Pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan secara berkelanjutan;
5. Melanjutkan, mengembangkan, memperbaiki, memelihara dan mengatasi kesenjangan infrastruktur dan sarana/prasarana publik, terutama di wilayah pegunungan Pinrang Utara;
6. Meningkatkan kemampuan masyarakat bersama pemerintah dalam mengelola sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk pelestarian ekosistem, pengurangan resiko bencana dan adaptasi perubahan iklim;
7. Membangun pusat pendidikan, pelatihan dan pengembangan pertanian terapan dalam mendukung Kabupaten Pinrang sebagai Poros Utama Pemenuhan Pangan Nasional serta Kawasan Pengembangan Ekonomi sejumlah Komoditas Unggulan.

## **b. Proses Penyusunan Renja Dinas Sosial**

Guna mewujudkan pencapaian visi dan misi sebagaimana tercantum di dalam RPJMD, maka Dinas Sosial Kabupaten Pinrang sebagai dinas yang melaksanakan program dan kegiatan di bidang sosial menyusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang tata cara pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

## **c. Keterkaitan Antara Renja Dinas Sosial dan Renstra Dinas Sosial dan RKPD Kab. Pinrang Tahun 2023**

Meningkatnya kesejahteraan umum bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan salah satu tujuan nasional yang tercantum dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945. Perkembangan di bidang kesejahteraan sosial sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan nasional pada hakekatnya adalah pembangunan manusia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakatnya. Pembangunan di bidang kesejahteraan sosial dilaksanakan melalui usaha-usaha kesejahteraan sosial yang mencakup semua upaya program dan kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan, membina, memelihara, memulihkan dan mengembangkan kesejahteraan sosial yang dilaksanakan bersama sebagai tanggung jawab perintah dan masyarakat.

Permasalahan pembangunan saat ini adalah adanya Pandemi Covid-19 yang berdampak ke seluruh sendi kehidupan, yakni sosial budaya dan ekonomi masyarakat. Dampak yang sangat terlihat dengan nyata adalah turunnya pertumbuhan ekonomi di Tahun 2020 – 2021. Di sisi lain kesempatan kerja sangat sulit sehingga tingkat pengangguran meningkat dan pemerintah harus berkonsentrasi terhadap kesehatan untuk meningkatkan imunitas tubuh dengan pemberian vaksin, sehingga anggaran tersedot ke bidang kesehatan dan berdampak pada pembangunan sektor lainnya seperti infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat.

## 1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Sosial Kabupaten Pinrang Tahun 2023 ini berlandaskan hukum pada arah dan garis kebijakan terkait yang telah dirumuskan, antara lain:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4275);
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2008 Nomor 61. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846)
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran 4 Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 - 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Perubahan RPJMD
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan

Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.90 Tahun 2019 tentang Kalasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
12. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rancangan Rencana Pemerintah Daerah Tahun 2023 Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 486);
13. Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Propinsi Sulawesi Selatan 2008-2028;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 06 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2017 Nomor 6;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pinrang Tahun 2009-2029;

### **1.3. MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **1.3.1. MAKSUD**

Maksud dari penyusunan Renja Dinas Sosial Kabupaten Pinrang merupakan penjabaran dari seluruh rencana kerja dari program/kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan dan diwujudkan untuk jangka waktu periode 1 (satu) tahun kedepan sesuai dengan ruang lingkup tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Pinrang.

#### **1.3.2. TUJUAN**

Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Kabupaten Pinrang Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

- a. Menetapkan program/kegiatan pembangunan di bidang sosial Dinas Sosial Kabupaten Pinrang selama 1 (satu) tahun ke depan dengan mengacu kepada RPJMD Kabupaten Pinrang;
- b. Menetapkan target dan indikator kinerja, lokasi, sasaran/kelompok sasaran maupun pagu anggaran pendanaan kegiatan;

- c. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Sekretariat dan Bidang di Dinas Sosial Kabupaten Pinrang untuk menunjang pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- d. Menjamin kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan skala prioritas dalam 1 (satu) tahun perencanaan.
- e. Adanya kesinambungan antara RPJMD , Renstra OPD dan Renja OPD untuk menunjang pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

#### **1.4. SISTEMATIKA PENULISAN**

Sistematika penulisan Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Kabupaten Pinrang Tahun 2023 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dengan penyajian sebagai berikut :

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Dinas Sosial, Proses Penyusunan Renja, keterkaitan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, dan Renstra OPD yang disusun sebagai berikut ;

- 1.1.Latar Belakang
- 1.2.Landasan Hukum
- 1.3.Maksud dan Tujuan
- 1.4.Sistematika Penulisan

#### **BAB II HASIL EVALUASI RENJA DINAS SOSIAL TAHUN LALU**

Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD Dinas Sosial tahun lalu Tahun 2021 (n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan Tahun 2022 (tahun n-1), target Renstra OPD berdasarkan realisasi program/kegiatan pelaksanaan Renja OPD tahun sebelumnya, review hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun lalu, realisasi

Renstra OPD mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan OPD/ atau realisasi APBD sebagai berikut :

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Sosial Tahun 2021 dan Capaian Renstra Dinas Sosial
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Sosial
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Sosial
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

### **BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS SOSIAL**

Memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi OPD, tujuan dan sasaran OPD serta program dan kegiatan, sebagai berikut :

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Sosial
- 3.3. Program dan Kegiatan

### **BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS SOSIAL**

Memuat uraian rencana kerja program dan kegiatan yang dilaksanakan

### **BAB V PENUTUP**

Berisikan uraian penutup, berupa catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut

## BAB II

### EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS SOSIAL TAHUN LALU

#### 2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA DINAS SOSIAL

Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2022 dan Capaian Renstra Dinas Sosial Kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan program/kegiatan Renja Dinas Sosial Tahun 2021 dan perkiraan capaian Tahun 2022 dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang sosial dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Keberhasilan yang telah dicapai dalam pelaksanaan kegiatan pada SKPD Dinas Sosial Kabupaten Pinrang pada Tahun 2021 ditentukan dari hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang disesuaikan dengan Renja tahun bersangkutan dari APBD Kabupaten Pinrang Tahun 2021. Pada Tahun 2021 Dinas Sosial menerima alokasi anggaran sebesar Rp 4.426.844.333,- yang dialokasikan untuk 7 program dan 16 kegiatan. Sampai akhir bulan Desember terealisasi sebesar Rp 4.276.903.912,- atau sebesar 96,4 % dengan rincian penggunaan anggaran sebagai berikut:

1. Belanja Operasi sebesar Rp. 4.284.344.333,-.
2. Belanja Modal sebesar Rp. 142.500.000,-.

Realisasi belanja operasi dan belanja modal Dinas Sosial Kabupaten Pinrang Tahun 2021 dalam bentuk kegiatan dapat diuraikan sebagai berikut :

##### 1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

No	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Out come	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan kinerja yang tersusun tepat waktu dansesuai aturan				
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perangkat Daerah yang di Susun	Dokumen	2	2	100

2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA yang tersusun	Dokumen	1	1	100
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA Perubahan yang disusun	Dokumen	1	1	100
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD yang disusun	Dokumen	1	1	100
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD yang disusun	Dokumen	1	1	100
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Yng tersusun sesuai aturan dan tepat waktu	Laporan	4	4	100
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renja dan Renstra yang tersusun	Dokumen	2	2	100
	<b>Administrasi Keuangan Daerah</b>	<b>Persentase ketercapaian pengelolaan administrasi keuangan SKPD</b>				
8	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terbayarkan gajinya tepat waktu	ASN	33	33	100
9	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah jenis alat tulis kantor yang tersedia sesuai kebutuhan	Jenis	21	21	100
10	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah jasa keuangan yang terbayarkan tepat waktu	Jasa	27	27	100
11	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan akhir tahun yang tersusun tepat waktu	Laporan	1	1	100
12	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan bulanan/triwulan/ semesteran SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran yang tersusun tepat waktu	Laporan	2	2	100
	<b>Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Dearah</b>	<b>Persentase ketercapaian pengelolaan barang milik daerah SKPD</b>				
13	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik daerah pada SKPD	Jumlah jasa pengelolaan Barang yang terbayarkan tepat waktu	Jasa	4	4	100
	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase ketercapaian pengelolaan administrasi kepegawaian SKPD</b>				

14	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah pakaian olahraga yang tersedia sesuai analisa kebutuhan	Orang	40	40	100
15	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen data kepegawaian yang tersusun	Dokumen	5	5	100
16	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah laporan SKP yang tersusun sesuai analisa kebutuhan	Laporan	33	33	100
17	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Sumber Daya Manusia Aparatur yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan sesuai analisa kebutuhan	Orang	8	8	100
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase ketercapaian pelayanan administrasi umum SKPD</b>				
18	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan kantor	Jumlah jenis penerangan kantor yang tersedia sesuai kebutuhan	Unit	3	3	100
19	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia sesuai analisa kebutuhan	Jenis	10	10	100
20	Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan	jumlah jenis spanduk yang tersedia sesuai analisa kebutuhan	Jenis	3	1	33
21	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang –undangan	jumlah jenis bahan bacaan yang tersedia sesuai analisa kebutuhan	Surat Kabar	9	9	100
22	Penyediaan Bahan/ Material	Jumlah kegiatan penyediaan bahan/ material pameran	Kegiatan	1	0	0
23	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	jumlah kegiatan yang terkoordinasikan sesuai analisa kebutuhan	Kali	70	70	100
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase ketercapaian jasa Penunjang urusan pemerintahan daerah SKPD</b>				
24	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah rekening listrik dan telepon yang terbayarkan tepat waktu	Rekening	12	12	100
25	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa tenaga pembersih yang terbayarkan tepat waktu	Orang	6	6	100
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase ketercapaian pemeliharaan barang milik daerah SKPD</b>				

26	Penyediaan Jasa pemeliharaan biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang dipelihara sesuai analisis kebutuhan	Unit	12	12	100
		Jumlah Bahan Bakar Minyak Gas dan Pelumas yang tersedia dan terbayarkan tepat waktu	Liter	3000	3000	100
		Jumlah Jasa Sopir yang tersedia dan terbayarkan tepat waktu	Jasa	2	2	100
27	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah peralatan kantor yang dipelihara sesuai analisa kebutuhan	Unit	21	21	100

## 2. PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL

No	Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Out come	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
	<b>Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>Persentase Pemberdayaan Sosial yang dilaksanakan</b>				
28	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah jasa tenaga kesejahteraan sosial kecamatan yang terbayarkan tepat waktu	Jasa	13	13	100
29	Peningkatan Kemampuan potensi sumber kesejahteraan sosial kelembagaan masyarakat kewenangan kabupaten/ kota	Jumlah Kegiatan pelatihan peningkatan kemampuan potensi sumber kesejahteraan sosial kelembagaan masyarakat kewenangan kabupaten/ kota	Kegiatan	1	1	100

## 3. PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN

No	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Out come	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
	<b>Pemulangan Warga negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari titik debarkasi di daerah kabupaten/ kota untuk</b>	<b>Persentase Pelaksanaan pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan yang</b>				

	dipulangkan ke desa/ kelurahan asal	dilaksanakan				
30	Fasilitasi Pemulangan Warga negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari titik debarkasi di daerah kabupaten/ kota untuk dipulangkan ke desa/ kelurahan asal	Jumlah Frekuensi Pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di daerah kabupaten / kota yang dilaksanakan	Kali	5	5	100

#### 4. PROGRAM REHABILITASI SOSIAL

No	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Out come	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
	<b>Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar,serta gelandangan pengemis diluar panti social</b>	<b>Persentase kegiatan rehabilitasi sosial dasar penyandang rehabilitas terlantar,anak terlantar, lanjut usia terlantar,serta gelandangan pengemis diluar panti sosial yang dilaksanakan</b>				
31	Penyediaan permakanan	jumlah penyediaan permakanan bagi lanjut usia terlantar yang dilaksanakan	Paket	20	20	100
32	Penyediaan sandang	Jumlah Ormas yang mendapat bantuan hibah	Paket	20	20	100
33	Penyediaan alat bantu	Jumlah penyediaan alat bantu bagi disabilitas terlantar yang dilaksanakan	buah	11	11	100
34	Pemberiaan pelayanan reunifikasi keluarga	Jumlah pelayanan reunifikasi keluarga bagi gelandangan ,pengemis yang dilaksanakan	Kali	3	3	100
35	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	Jumlah pelayanan penelusuran keluarga bagi disabilitas terlantar	Kali	3	3	100
	<b>rehabilitasi sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) Lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA dan NAPZA diluar panti sosial</b>	<b>Persentase kegiatan rehabilitasi sosial yang dilaksanakan</b>				
36	Pemberiaan layanan data dan pengaduan	Jumlah kegiatan layanan data dan pengaduan yang terlaksana	Kegiatan	1	1	100
37	Penyediaan Permakanan	jumlah pemberian bantuan permakanan	Paket	34	34	100
38	Pemberian Layanan Rujukan	jumlah kegiatan pemberian layanan rujukan	Kali	4	4	100

## 5. PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL

No	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Out come	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
	<b>Pemeliharaan Anak-anak Terlantar</b>	<b>Persentase pelaksanaan kegiatan pemeliharaan anak-anak terlantar yang terlaksana</b>				
39	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Penjangkauan Anak-Anak Terlantar yang Dilaksanakan	Kali	6	6	100
40	Rujukan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Pelaksanaan rujukan anak-anak terlantar	Kali	4	4	100
41	Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	Jumlah Pemantauan terhadap pemeliharaan anak terlantar yang dilaksanakan	Kali	2	2	100
	<b>Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>Persentase pelaksanaan kegiatan pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/ kota</b>				
42	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ kota	Sampel	1000	0	0
43	Pengelolaan data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Jasa Tenaga Pendamping Keluarga Harapan yang terbayarkan tepat waktu	Jasa	41	41	100

## 6. PROGRAM PENANGANAN BENCANA

No	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Out come	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
	<b>Perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial kabupaten / kota</b>	<b>Persentase pelaksanaan perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial kabupaten / kota</b>				
44	Penyediaan Permakanan	Pemberian bahan makanan korban bencana alam dan bencana sosial yang terlaksana	Paket	35	35	100
45	Penyediaan sandang	Jumlah sandang yang diberikan pada korban bencana	Paket	24	24	100
	<b>Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana kabupaten / kota</b>	<b>Persentase penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana kabupaten / kota yang terlaksana</b>				
56	koordinasi, sosialisasi dan pelaksanaan taruna siaga bencana	Jumlah dana operasional taruna siaga bencana yang terbayarkan tepat waktu	Orang	44	44	100

## 7. PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN

No	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Out come	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
	Pemeliharaan taman makam pahlawan nasional kabupaten / kota	persentase pelaksanaan pemeliharaan taman makam pahlawan nasional kabupaten / kota yang terlaksana				
57	Pemeliharaan taman makam pahlawan nasional kabupaten / kota	Jumlah jasa petugas pembersih TMP/TMB yang tembayarkan tepat waktu	Jasa	11	11	100

Realisasi belanja operasi dan belanja modal Dinas Sosial Kabupaten Pinrang Tahun 2021 dalam bentuk kegiatan dapat diuraikan sebagai berikut :

- 1) **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**, pagu anggaran Rp. 3.570.731.333,- dengan realisasi sebesar Rp.3.498.617.712,- atau 97% dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

NO	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	PERSENTASE (%)
	<b>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>20.825.000</b>	<b>17.885.000</b>	<b>86%</b>
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.990.000	3.990.000	100%
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	3.155.000	2.735.000	87%
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	2.350.000	2.350.000	100%
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	2.665.000	2.665.000	100%
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	2.605.000	2.605.000	100%
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.840.000	1.320.000	34%
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.220.000	2.220.000	100%
	<b>Administrasi Keuangan Daerah</b>	<b>2.918.229.333</b>	<b>2.892.449.981</b>	<b>98%</b>
9	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.667.896.333	2.643.980.981	97%
10	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	65.543.000	64.379.000	98%

11	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	181.570.000	180.870.000	100%
12	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Akhir Tahun SKPD	2.030.000	2.030.000	100%
13	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan bulanan/triwulan/ semesteran SKPD	1.190.000	1.190.000	100%
	<b>Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah</b>	<b>22.455.000</b>	<b>22.455.000</b>	<b>100%</b>
14	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik daerah pada SKPD	22.455.000	22.455.000	100%
	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>76.085.000</b>	<b>75.385.000</b>	<b>99%</b>
15	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	14.000.000	14.000.000	100%
16	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	10.890.000	10.840.000	100%
17	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	1.315.000	1.315.000	100%
18	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundangundangan	49.880.000	49.230.000	99%
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>327.750.000</b>	<b>322.502.003</b>	<b>98%</b>
19	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan kantor	1.850.000	1.850.000	100%
20	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	142.500.000	137.500.000	96%
21	Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan	-	-	-
22	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang –undangan	8.400.000	8.400.000	100%
23	Penyediaan Bahan/ Material	-	-	-
24	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	175.000.000	174.752.003	100%
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>107.433.000</b>	<b>78.746.333</b>	<b>73%</b>
25	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	74.592.000	45.905.333	62%
26	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	32.841.000	32.841.000	100%

	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>97.954.000</b>	<b>89.194.395</b>	<b>91%</b>
27	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	89.144.000	80.384.396	90%
28	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	8.810.000	8.810.000	100%

- 2) **PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**, pagu anggaran Rp. 102.470.000,- dengan realisasi sebesar Rp.101.120.000,- atau 88 % dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

No	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	PERSENTASE (%)
	<b>Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>102.470.000</b>	<b>101.120.000</b>	<b>99%</b>
1	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	79.820.000	78.820.000	99%
2	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	22.650.000	22.300.000	98%

- 3) **PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN**, pagu anggaran Rp. 3.620.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 720.000,- atau 20% dengan rincian sebagai berikut :

No	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	PERSENTASE (%)
	<b>Kegiatan Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk di Pulangkan ke Desa/Kelurahan Asal</b>	<b>3.620.000</b>	<b>720.000</b>	<b>20%</b>
1	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk di Pulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	3.620.000	720.000	20%

- 4) **PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**, pagu anggaran Rp. 139.105.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 121.482.200,- atau 87% dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

No	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	PERSENTASE (%)
	<b>Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial</b>	<b>96.420.000</b>	<b>83.100.000</b>	<b>86%</b>
1	Penyediaan Permakanan	25.055.000	24.915.000	99%
2	Penyediaan Sandang	16.680.000	16.510.000	99%

3	Penyediaan Alat Bantu	36.635.000	33.835.000	92%
4	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	6.495.000	2.325.000	36%
5	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akte Kelahiran, Surat Nikah dan Kartu Identitas Anak.	3.050.000	2.880.000	94%
6	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	8.505.000	2.635.000	31%
	<b>Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial</b>	<b>42.685.000</b>	<b>38.382.200</b>	<b>90%</b>
7	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	7.050.000	6.880.000	98%
8	Penyediaan Permakanan	31.405.000	28.322.200	90%
9	Pemberian Layanan Rujukan	4.230.000	3.180.000	75%

- 5) Program Perlindungan dan Jaminan Sosial, pagu anggaran Rp. 346.693.000,- dengan realisasi sebesar Rp.291.074.000,- atau 84% dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

No	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	PERSENTASE (%)
	<b>Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar</b>	<b>30.820.000</b>	<b>10.040.000</b>	<b>33%</b>
1	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	16.400.000	6.205.000	38%
2	Rujukan Anak-Anak Terlantar	9.790.000	795.000	8%
3	Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	4.630.000	3.040.000	66%
	<b>Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>315.873.000</b>	<b>281.034.000</b>	<b>89%</b>
4	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	45.175.000	42.074.000	93%
5	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	270.698.000	238.960.000	88%

- 6) **PROGRAM PENANGANAN BENCANA**, pagu anggaran Rp 191.065.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 190.730.000,- atau 100% dengan rincian sebagai berikut :

No	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	PERSENTASE (%)
	<b>Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota</b>	<b>82.465.000</b>	<b>82.130.000</b>	<b>100%</b>
1	Penyediaan Makanan	39.435.000	39.190.000	99%
2	Penyediaan Sandang	43.030.000	42.940.000	100%
	<b>Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota</b>	<b>108.600.000</b>	<b>108.600.000</b>	<b>100%</b>

1	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	108.600.000	108.600.000	100%
---	--	-------------	-------------	------

- 7) **PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN**, pagu anggaran Rp 73.160.000,- dengan realisasi sebesar Rp 73.160.000,- atau 100% dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

No	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	PERSENTASE (%)
	<b>Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota</b>	<b>73.160.000</b>	<b>73.160.000</b>	<b>100%</b>
1	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	73.160.000	73.160.000	100%

**Tabel T-C.29.**  
**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Sosial**  
**dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022**  
**Kabupaten Pinrang**

**Dinas Sosial**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Perangkat Daerah) Tahun 2019 - 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun (2019-2024)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan					
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (2020)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (2020)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)				
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)				
<b>6 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL</b>														
<b>6 01 DINAS SOSIAL KAB.PINRANG</b>														
<b>6</b>	<b>01</b>	<b>01</b>		<b>Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota</b>	<b>Persentase kebutuhan layanan administrasi perkantoran yang terpenuhi</b>									
<b>6</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran ,dan Evaluasi kinerja perangkat Daerah</b>	<b>Presentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah</b>									
6	01	01	2.01	02	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang tersusun sesuai aturan	5 Dokumen	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	2 Dokumen	40%
6	01	01	2.01	03	Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen perubahan RKA-SKPD yang tersusun sesuai aturan	5 Dokumen	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	2 Dokumen	40%
6	01	01	2.01	04	Koordinasi dan penyusunan dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang tersusun sesuai aturan	5 Dokumen	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	2 Dokumen	40%
6	01	01	2.01	05	Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen perubahan DP A-SKPD yang tersusun sesuai aturan	5 Dokumen	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	2 Dokumen	40%
6	01	01	2.01	06	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang tersusun sesuai aturan	5 Laporan	5 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	2 Laporan	40%



6	01	01	2.06	01	Penyediaan komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor	Jumlah bangunan kantor yang komponen instalasi listrik/penerangannya tersedia secara optimal	5 Unit	5 Unit	1 Unit	1 Unit	100%	1 Unit	2 Unit	40%
6	01	01	2.06	02	Penyediaan n peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah alat kelengkapan kantor yang diadakan sesuai analisa kebutuhan	15 Unit	15 Unit	3 Unit	3 Unit	100%	3 Unit	6 Unit	40%
6	01	01	2.06	05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan yang diadakan sesuai kebutuhan	5 paket	5 paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	2 Paket	40%
6	01	01	2.06	06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Peraturan Perundang-undangan yang tersedia sesuai analisa kebutuhan	50 Surat Kabar	50 Surat Kabar	10 Surat Kabar	10 Surat Kabar	100%	10 Surat Kabar	20 Surat Kabar	40%
6	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah kegiatan yang terkoordinasikan sesuai analisa kebutuhan	100 Kegiatan	100 Kegiatan	20 Kegiatan	20 Kegiatan	100%	20 Kegiatan	40 Kegiatan	40%
<b>6</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>2.08</b>		<b>Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah</b>									
6	01	01	2.08	02	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Jumlah rekening layanan internet, telepon dan listrik yang terbayarkan tepat waktu	60 Rekening	60 Rekening	12 Rekening	12 Rekening	100%	12 Rekening	24 Rekening	40%
6	01	01	2.08	04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah jasa kebersihan kantor yang tersedia dan terbayarkan tepat waktu	30 Orang	30 Orang	6 Orang	6 Orang	100%	6 Orang	12 Orang	40%
<b>6</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>2.09</b>		<b>Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah</b>									
6	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas jabatan	Jumlah Kendaraan dinas operasional yang dipelihara sesuai analisa kebutuhan	50 Unit	50 Unit	10 Unit	10 Unit	100%	10 Unit	20 Unit	40%
6	01	01	2.09	06	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara sesuai analisa kebutuhan	30 Unit	30 Unit	6 Unit	6 Unit	100%	6 Unit	12 Unit	40%

6	02	02			<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL</b>	<b>Cakupan Tenaga Kesejahteraan Sosial yang dibina</b>								
6	01	02	03		<b>Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten / Kota</b>									
6	01	02	03	02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Tenaga Kesejahteraan yang potensinya dikembangkan	12 Orang	12 Orang	12 Orang	13 Orang	100%	12 Orang	26 Orang	40%
6	04	02			<b>PROGRAM REHABILITASI SOSIAL</b>	<b>Persentase Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial</b>								
6	04	02	01		<b>Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis Diluar Panti Sosial</b>									
6	04	02	01	01	Penyediaan Permakanan	Persentase penyediaan permakanan bagi disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar serta gelandangan pengemis yang dilaksanakan	200 Paket	200 Paket	40 Paket	40 Paket	100%	40 Paket	80 Paket	40%
6	04	02	01	02	Penyediaan Sandang	Persentase penyediaan sandang bagi disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar serta gelandangan pengemis yang dilaksanakan	200 Paket	200 Paket	35 Paket	35 Paket	100%	35 Paket	70 Paket	40%
6	04	02	01	03	Penyediaan Alat Bantu	Persentase penyediaan alat bantu bagi disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar serta gelandangan pengemis yang dilaksanakan	20 Paket	20 Paket	4 Paket	4 Paket	100%	4 Paket	8 Paket	40%
6	04	02	01	04	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Persentase Pelayanan Penelusuran Keluarga yang terlaksana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	200%	40%

6	04	02	02		<b>Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Diluar Panti Sosial</b>	Persentase kegiatan rehabilitasi sosial yang dilaksanakan								
6	04	02	02	01	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Persentase layanan data dan pengaduan yang terlaksana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	200%	40%
6	04	02	02	03	Penyediaan Permakanan	Persentase penyediaan permakanan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	200%	40%
6	04	02	02	13	Pemberian Layanan Rujukan	Persentase pemberian layanan rujukan yang terlaksana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	200%	40%
<b>6</b>	<b>05</b>	<b>02</b>			<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL</b>	<b>Persentase perlindungan dan jaminan sosial</b>								
6	05	02	01		<b>Pemeliharaan Anak - Anak Terlantar</b>	Persentase kegiatan pemeliharaan anak - anak terlantar yang terlaksana								
6	05	02	01	01	Penjangkauan Anak - Anak Terlantar	Persentase penjangkauan anak terlantar yang terlaksana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	200%	40%
6	04	02	01	02	Rujukan Anak - Anak Terlantar	Persentase rujukan anak terlantar yang terlaksana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	200%	40%
6	04	02	01	03	Pemantauan terhadap pelaksanaan pemeliharaan Anak Terlantar	Persentase pemantauan terhadap pelaksanaan pemeliharaan anak terlantar yang terlaksana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	200%	40%
6	05	02	02		<b>Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten / Kota</b>	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Kecakupan Daerah Kabupaten / Kota								
6	05	02	02	01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten / Kota	jumlah Jasa Operator SIKS-NG yang terbayarkan tepat waktu	25 Jasa	25 Jasa	5 Jasa	5 Jasa	100%	5 Jasa	10 Jasa	40%
6	05	02	02	02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah jasa tenaga pendamping keluarga harapan yang terbayarkan tepat waktu	180 Jasa	180 Jasa	36 Jasa	36 Jasa	100%	36 Jasa	72 Jasa	40%

6	06	02			<b>PROGRAM PENANGANAN BENCANA</b>	<b>Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya pada saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah Kabupaten / Kota</b>								
6	06	02	01		<b>Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten / Kota</b>	Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya pada saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah Kabupaten / Kota								
6	06	02	01	01	Penyediaan Makanan	Jumlah pemberian bahan makanan korban bencana alam dan bencana sosial yang terlaksana	250 Paket	250 Paket	50 Paket	50 Paket	100%	50 Paket	100 Paket	40%
6	06	02	01	02	Penyediaan Sandang	Jumlah penyediaan Sandang bagi korban bencana alam dan bencana sosial yang terlaksana	250 Paket	250 Paket	50 Paket	50 Paket	100%	50 Paket	100 Paket	40%
6	06	02	02		<b>Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten / Kota</b>	Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya pada saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah Kabupaten / Kota								
6	06	02	02	02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Persentase taruna siaga bencana yang aktif	225 Orang	225 Orang	45 Orang	45 Orang	100%	45 Orang	90 Orang	40%
6	07	02			<b>PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN</b>	<b>Persentase Pengelolaan Taman Makam Pahlawan</b>								
6	07	02	01		<b>Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten / Kota</b>	Persentase Pelaksanaan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten Kota yang Terlaksana								
6	07	02	01	01	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten / Kota	Jumlah jasa petugas pembersih TMP / TMB yang terbayarkan tepat waktu	55 Orang	55 Orang	11 Orang	11 Orang	100%	11 Orang	22 Orang	40%

## 2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN DINAS SOSIAL

Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Pinrang di Bidang Sosial secara umum berdasarkan pada Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) serta program program nasional, provinsi dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) maupun terhadap IKK/IKU, Jenis Indikator Program/Kegiatan yang dikaji disesuaikan dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Pinrang.

Untuk Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang sosial berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, dan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Adapun Standar Pelayanan Minimal (SPM) terdiri atas 5 jenis layanan dasar yaitu ;

- a. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti;
- b. Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti;
- c. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti;
- d. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti;
- e. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten/kota;

Dinas Sosial yang membidangi Sekretariat, Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, Bidang Rehabilitasi Sosial dan Bidang Pemberdayaan Sosial yang telah menetapkan sasaran dan target kinerja dengan langkah-langkah yang berisi programprogram indikatif untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sehingga program pembangunan di Kabupaten Pinrang yang tertuang dalam Visi dan Misi RPJMD 2019-2024 Kabupaten Pinrang dapat terlaksana sesuai rencana.

Kemampuan teknis perencanaan perlu ditingkatkan dan dikembangkan, sehingga program pembangunan yang mewadahi aspirasi masyarakat dapat terlaksana sebagaimana mestinya. Tingginya tingkat kualitas dan kemampuan sumber daya aparatur akan menjadi indikator berhasilnya program pembangunan yang direncanakan. Selain itu terjadinya peningkatan kualitas sumber daya aparatur akan sejalan dengan profesionalitas pelayanan publik sehingga good governance dapat berjalan sesuai amanat reformasi birokrasi.

Analisis Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial dapat di uraikan pada tabel 2.2 dibawah ini :

Tabel T-C.30.  
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial  
Kabupaten Pinrang TA. 2022

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi OPD SDA & BK	Target SPM / IKK / IKU / Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun Ke -						Realisasi Capaian Tahun Ke -						Target Renstra SKPD Tahun Ke -		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2023	2024	Catatan Analisis
1	Nilai SAKIP	IKU	70	70	70	70	72		52,94	60,84	65	70	72		100		
2	Persentase Pemberdayaan Sosial yang dilaksanakan	IKU	-	25	50	75	80		-	30	60	75	80		100		
3	Persentase Pemulangan WNI Migran	IKU	-	100	100	100	100		-	100	100	100	100		100		
4	Persentase Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial	IKK	-	100	100	100	100		-	100	100	100	100		100		
5	Persentase Perlindungan dan Jaminan Sosial	IKK	-	100	100	100	100		-	100	100	100	100		100		
6	Persentase Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	IKU	-	100	100	100	100		-	100	100	100	100		100		
7	Persentase penduduk di bawah garis kemiskinan	IKU	8,01	6	4.25	4	3,75		8,01	6	4.25	4	3,75		100		
8	Jumlah rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti	SPM	-	15	20	25	30		-	15	20	25	30		100		
9	Jumlah rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti	SPM	-	28	30	35	40		-	28	30	35	40		100		
10	Jumlah rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di luar panti	SPM	-	230	250	270	280		-	230	250	270	280		100		
11	Jumlah rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	SPM	-	5	8	10	12		-	5	8	10	12		100		
12	Jumlah perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten	SPM	114	92	100	120	140		114	92	100	120	140		100		

### **2.3. ISU – ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS SOSIAL KABUPATEN PINRANG**

Tingkat capaian kinerja Dinas Sosial Kabupaten Pinrang pada Tahun 2021 sudah tergolong baik, termasuk dalam pencapaian target Indikator Kinerja Utama dan LKPJ yang semakin membaik, dimana realisasi dari target tersebut telah tercapai. Tingkat capaian kinerja yang membaik itu masih tergolong relatif kecil disebabkan oleh jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang ada di Kabupaten Pinrang sangat besar jumlahnya sedangkan anggaran yang dilimpahkan kepada Dinas Sosial Kabupaten Pinrang tidak sebanding dengan jumlah PMKS yang ada.

Ketercapaian dan ketidaktercapaian atas target kinerja penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial di Kabupaten Pinrang yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Pinrang tentunya tidak terlepas dari berbagai permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan pelayanan kesejahteraan sosial, adapun permasalahan dan hambatan yang dihadapi tersebut diantaranya :

1. Adanya pandemi Covid-19 yang mengakibatkan rasionalisasi anggaran sehingga kegiatan banyak yang tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan target seperti kegiatan sosialisasi dan pelatihan untuk organisasi mitra di Dinas Sosial;
2. Kurangnya tenaga ahli psikososial untuk menangani para korban pasca bencana dan memberikan trauma healing bagi anak terlantar dan lansia terlantar;
3. Keterbatasan kapasitas ruangan pada Rumah Singgah dalam memberikan pelayanan/penanganan konseling dan trauma healing serta isolasi sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) atau Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) khususnya Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Tuna Susila.

### **2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD**

Berdasarkan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pinrang Tahun 2023 bahwa Dinas Sosial Kabupaten Pinrang bertanggungjawab atas penyelenggaraan salah satu prioritas daerah terkait penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kabupaten Pinrang. Dalam Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 tidak menyebutkan kegiatan secara mendetail, hanya memperlihatkan program pokok

dengan indikator kerjanya. Indikator yang tercantum dalam Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 sudah disesuaikan dengan Perubahan Renstra Dinas Sosial Tahun 2019-2024. Review Rancangan Awal RKPD dapat dilihat pada Tabel T-C.31 dibawah ini :

**Tabel T-C. 31**  
**Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022**  
**Kabupaten Pinrang**

Dinas Sosial Kabupaten Pinrang

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif ( Rp )	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif ( Rp )	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL</b>											
<b>DINAS SOSIAL KAB.PINRANG</b>											
	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota</b>		<b>Persentase kebutuhan layanan administrasi perkantoran yang terpenuhi</b>	100%		<b>Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota</b>		<b>Persentase kebutuhan layanan administrasi administrasi perkantoran yang terpenuhi</b>	100%		
	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi kinerja perangkat Daerah</b>		<b>Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan kinerja yang tersusun tepat waktu dan sesuai aturan</b>	100%		<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi kinerja perangkat Daerah</b>		<b>Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan kinerja yang tersusun tepat waktu dan sesuai aturan</b>	100%		
	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	Kab. Pinrang	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang tersusun sesuai aturan	1 Dokumen	3.215.000	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	Kab. Pinrang	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang tersusun sesuai aturan	1 Dokumen	3.225.000	
	Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	Kab. Pinrang	Jumlah Dokumen perubahan RKA-SKPD yang tersusun sesuai aturan	1 Dokumen	1.470.000	Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	Kab. Pinrang	Jumlah Dokumen perubahan RKA-SKPD yang tersusun sesuai aturan	1 Dokumen	1.470.000	
	Koordinasi dan penyusunan dokumen DPA-SKPD	Kab. Pinrang	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang tersusun sesuai aturan	1 Dokumen	1.470.000	Koordinasi dan penyusunan dokumen DPA-SKPD	Kab. Pinrang	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang tersusun sesuai aturan	1 Dokumen	1.470.000	

	Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD	Kab. Pinrang	Jumlah Dokumen perubahan DP A-SKPD yang tersusun sesuai aturan	1 Dokumen	1.470.000	Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD	Kab. Pinrang	Jumlah Dokumen perubahan DP A-SKPD yang tersusun sesuai aturan	1 Dokumen	1.470.000	
	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Kab. Pinrang	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang tersusun sesuai aturan	1 Laporan	5.880.000	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Kab. Pinrang	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang tersusun sesuai aturan	1 Laporan	5.880.000	
	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Kab. Pinrang	Jumlah Dokumen RENJA dan RENSTRA yang Tersusun	1 Dokumen	1.400.000	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Kab. Pinrang	Jumlah Dokumen RENJA dan RENSTRA yang Tersusun	1 Dokumen	1.400.000	
	<b>Administrasi keuangan perangkat daerah</b>		<b>Persentase ketercapaian pengelolaan administrasi keuangan SKPD</b>			<b>Administrasi keuangan perangkat daerah</b>		<b>Persentase ketercapaian pengelolaan administrasi keuangan SKPD</b>			
	Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN	Kab. Pinrang	Jumlah gaji ASN yang terbayarkan secara tepat waktu	12 Bulan	2.460.409.349	Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN	Kab. Pinrang	Jumlah gaji ASN yang terbayarkan secara tepat waktu	12 Bulan	2.647.245.881	
	Penyediaan Administrasi pelaksanaan tugas ASN	Kab. Pinrang	Jumlah Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN yang terlaksana	100%	72.135.000	Penyediaan Administrasi pelaksanaan tugas ASN	Kab. Pinrang	Jumlah Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN yang terlaksana	100%	72.135.000	
	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Kab. Pinrang	Jumlah Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan yang terbayarkan tepat waktu	12 Bulan	168.940.000	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Kab. Pinrang	Jumlah Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan yang terbayarkan tepat waktu	12 Bulan	176.140.000	
	Koordinasi penyusunan keuangan akhir tahun SKPD	Kab. Pinrang	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang tersusun tepat waktu	1 Laporan	3.020.000	Koordinasi penyusunan keuangan akhir tahun SKPD	Kab. Pinrang	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang tersusun tepat waktu	1 Laporan	3.000.000	
	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan /semesteran SKPD	Kab. Pinrang	Jumlah laporan keuangan semesteran yang tersusun tepat waktu	2 Laporan	2.810.000	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan /semesteran SKPD	Kab. Pinrang	Jumlah laporan keuangan semesteran yang tersusun tepat waktu	2 Laporan	2.800.000	

	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada perangkat daerah</b>		<b>Persentase ketercapaian pengelolaan barang milik daerah SKPD</b>			<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada perangkat daerah</b>		<b>Persentase ketercapaian pengelolaan barang milik daerah SKPD</b>			
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Kab. Pinrang	Jumlah Laporan Aset yang tersusun	2 Laporan	12.075.000	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Kab. Pinrang	Jumlah Laporan Aset yang tersusun	2 Laporan	12.000.000	
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Pinrang	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	0	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Pinrang	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	20.000.000	
	<b>Administrasi kepegawaian perangkat daerah</b>		<b>Persentase ketercapaian pengelolaan administrasi kepegawaian SKPD</b>			<b>Administrasi kepegawaian perangkat daerah</b>		<b>Persentase ketercapaian pengelolaan administrasi kepegawaian SKPD</b>			
	Pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	Kab. Pinrang	Jumlah Laporan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian yang dibuat	7 Laporan	21.100.000	Pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	Kab. Pinrang	Jumlah Laporan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian yang dibuat	7 Laporan	15.000.000	
	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kab. Pinrang	Jumlah Dokumen monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai	12 Dokumen	0	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kab. Pinrang	Jumlah Dokumen monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai	12 Dokumen	20.000.000	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Kab. Pinrang	Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek dan implementasi peraturan perundang-undangan sesuai analisa kebutuhan	10 Orang	98.000.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Kab. Pinrang	Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek dan implementasi peraturan perundang-undangan sesuai analisa kebutuhan	10 Orang	100.000.000	
	<b>Administrasi umum perangkat Daerah</b>		<b>Persentase ketercapaian pelayanan administrasi umum SKPD</b>			<b>Administrasi umum perangkat Daerah</b>		<b>Persentase ketercapaian pelayanan administrasi umum SKPD</b>			

	Penyediaan komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor	Kab. Pinrang	Jumlah bangunan kantor yang komponen instalasi listrik/penerangannya tersedia secara optimal	1 Unit	7.500.000	Penyediaan komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor	Kab. Pinrang	Jumlah bangunan kantor yang komponen instalasi listrik/penerangannya tersedia secara optimal	1 Unit	7.500.000	
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Kab. Pinrang	Jumlah alat kelengkapan kantor yang diadakan sesuai analisa kebutuhan	3 Unit	108.500.000	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Kab. Pinrang	Jumlah alat kelengkapan kantor yang diadakan sesuai analisa kebutuhan	3 Unit	40.000.000	
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kab. Pinrang	Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan yang diadakan sesuai kebutuhan	1 Paket	3.750.000	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kab. Pinrang	Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan yang diadakan sesuai kebutuhan	1 Paket	4.000.000	
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kab. Pinrang	Jumlah Peraturan Perundang-undangan yang tersedia sesuai analisa kebutuhan	10 Surat Kabar	8.700.000	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kab. Pinrang	Jumlah Peraturan Perundang-undangan yang tersedia sesuai analisa kebutuhan	10 Surat Kabar	10.000.000	
	Penyediaan Bahan/ Material	Kab. Pinrang	Jumlah paket bahan/ material yang disediakan	1 Paket	0	Penyediaan Bahan/ Material	Kab. Pinrang	Jumlah paket bahan/ material yang disediakan	1 Paket	15.000.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Pinrang	jumlah kegiatan yang terkoordinasikan sesuai analisa kebutuhan	20 Kegiatan	150.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Pinrang	Jumlah kegiatan yang terkoordinasikan sesuai analisa kebutuhan	20 Kegiatan	160.000.000	
	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		<b>Persentase ketercapaian Barang Milik Daerah</b>			<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		<b>Persentase ketercapaian Barang Milik Daerah</b>			

	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Pinrang	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	1 unit	0	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Pinrang	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	1 unit	0	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Pinrang	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	1 unit	0	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Pinrang	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	1 unit	100.000.000	
	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Kab. Pinrang	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang disediakan	1 unit	20.000.000	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Kab. Pinrang	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang disediakan	1 unit	20.000.000	
	<b>Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah</b>		<b>Persentase ketercapaian jasa Penunjang urusan pemerintahan daerah SKPD</b>			<b>Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah</b>		<b>Persentase ketercapaian jasa Penunjang urusan pemerintahan daerah SKPD</b>		<b>0</b>	
	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Kab. Pinrang	Jumlah rekening layanan internet, telepon dan listrik yang terbayarkan tepat waktu	12 Rekening	66.252.000	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Kab. Pinrang	Jumlah rekening layanan internet, telepon dan listrik yang terbayarkan tepat waktu	12 Rekening	60.000.000	
	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Kab. Pinrang	Jumlah laporan penyediaan jasa Pelayanan umum kantor yang disediakan	12 laporan	32.370.000	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Kab. Pinrang	Jumlah laporan penyediaan jasa Pelayanan umum kantor yang disediakan	12 laporan	30.000.000	
	<b>Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah</b>		<b>Persentase ketercapaian pengadaan Barang MiliK Daerah</b>			<b>Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah</b>		<b>Persentase ketercapaian pengadaan Barang MiliK Daerah</b>			
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas jabatan	Kab. Pinrang	Jumlah Kendaraan dinas operasional yang dipelihara sesuai analisa kebutuhan	10 Unit	65.155.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas jabatan	Kab. Pinrang	Jumlah Kendaraan dinas operasional yang dipelihara sesuai analisa kebutuhan	11 Unit	80.000.000	
	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Kab. Pinrang	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara sesuai analisa kebutuhan	6 Unit	6.100.000	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Kab. Pinrang	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara sesuai analisa kebutuhan	15 Unit	15.000.000	

	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya	Kab. Pinrang	Jumlah Gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	1 Unit	0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya	Kab. Pinrang	Jumlah Gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	1 Unit	150.000.000	
	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL</b>		<b>Cakupan Tenaga Kesejahteraan Sosial yang dibina</b>			<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL</b>		<b>Cakupan Tenaga Kesejahteraan Sosial yang dibina</b>			
	<b>Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten / Kota</b>		<b>Persentase Pemberdayaan Sosial yang dilaksanakan</b>			<b>Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten / Kota</b>		Persentase Pemberdayaan Sosial yang dilaksanakan			
	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Pinrang	Jumlah orang mendapat peningkatan kapasitas pekerja sosial masyarakat kewenangan kabupaten/kota	12 Orang	0	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Pinrang	Jumlah orang mendapat peningkatan kapasitas pekerja sosial masyarakat kewenangan kabupaten/kota	12 Orang	30.000.000	
	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Pinrang	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang meningkat kapasitasnya kewenangan kabupaten/kota Persentase Tenaga Kesejahteraan yang potensinya dikembangkan	12 Orang	129.356.000	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Pinrang	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang meningkat kapasitasnya kewenangan kabupaten/kota Persentase Tenaga Kesejahteraan yang potensinya dikembangkan	12 Orang	50.000.000	
	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Pinrang	Jumlah Keluarga yang meningkat kapasitasnya kewenangan kabupaten / kota Persentase Tenaga Kesejahteraan yang potensinya dikembangkan	40 Keluarga	0	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Pinrang	Jumlah Keluarga yang meningkat kapasitasnya kewenangan kabupaten / kota Persentase Tenaga Kesejahteraan yang potensinya dikembangkan	40 Keluarga	40.000.000	

	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Pinrang	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang meningkat kapasitasnya kewenangan kabupaten / kota	1 Lembaga	0	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Pinrang	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang meningkat kapasitasnya kewenangan kabupaten / kota	1 Lembaga	30.000.000	
	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Kab. Pinrang	Jumlah Sertifikat yang dari hasil peningkatan sumber daya manusia dan lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga (LK3) kewenangan kabupaten/kota	12 sertifikat	0	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Kab. Pinrang	Jumlah Sertifikat yang dari hasil peningkatan sumber daya manusia dan lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga (LK3) kewenangan kabupaten/kota	12 sertifikat	53.000.000	
	<b>PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN</b>		<b>Persentase Pemulangan WNI Migran</b>			<b>PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN</b>		<b>Persentase Pemulangan WNI Migran</b>			
	<b>Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa / Kelurahan Asal</b>		<b>Persentase Pelaksanaan Pemulangan warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dilaksanakan</b>			<b>Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa / Kelurahan Asal</b>		<b>Persentase Pelaksanaan Pemulangan warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dilaksanakan</b>			
	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten / Kota untuk dipulangkan ke Desa / Kelurahan Asal	Kab. Pinrang	Jumlah warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari titik debarkasi di daerah provinsi untuk dipulangkan ke Desa / Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten / Kota	5 Orang	0	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten / Kota untuk dipulangkan ke Desa / Kelurahan Asal	Kab. Pinrang	Jumlah warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari titik debarkasi di daerah provinsi untuk dipulangkan ke Desa / Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten / Kota	5 Orang	6.000.000	
	<b>PROGRAM REHABILITASI SOSIAL</b>		<b>Persentase Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial</b>			<b>PROGRAM REHABILITASI SOSIAL</b>		<b>Persentase Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial</b>			



	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Kab. Pinrang	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten / Kota	100 orang	0	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Kab. Pinrang	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten / Kota	100 orang	5.500.000	
	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Kab. Pinrang	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan kabupaten / kota	100 orang	0	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Kab. Pinrang	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan kabupaten / kota	100 orang	5.500.000	
	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan Kartu Identitas Anak	Kab. Pinrang	Jumlah orang yang terpenuhi kebutuhan pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan Kartu Identitas Anak bagi penyandang disabilitas Kewenangan kabupaten / kota	12 kecamatan	0	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan Kartu Identitas Anak	Kab. Pinrang	Jumlah orang yang terpenuhi kebutuhan pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan Kartu Identitas Anak bagi penyandang disabilitas Kewenangan kabupaten / kota	12 kecamatan	6.000.000	
	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Kab. Pinrang	Jumlah orang yang mendapatkan akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar kewenangan kabupaten / kota	12 kecamatan	0	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Kab. Pinrang	Jumlah orang yang mendapatkan akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar kewenangan kabupaten / kota	12 kecamatan	5.000.000	
	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Kab. Pinrang	Jumlah orang yang mendapatkan layanan data dan pengaduan kewenangan kabupaten / kota	12 kecamatan	0	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Kab. Pinrang	Jumlah orang yang mendapatkan layanan data dan pengaduan kewenangan kabupaten / kota	12 kecamatan	10.000.000	
	Pemberian Layanan Kedaruratan	Kab. Pinrang	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kedaruratan kewenangan kabupaten	12 kecamatan	0	Pemberian Layanan Kedaruratan	Kab. Pinrang	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kedaruratan	12 kecamatan	200.000.000	

			/ kota					kewenangan kabupaten / kota			
	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Kab. Pinrang	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan Penelusuran Keluarga kewenangan kabupaten / kota	10 orang	0	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Kab. Pinrang	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan Penelusuran Keluarga kewenangan kabupaten / kota	10 orang	5.000.000	
	Pemberian Layanan Rujukan	Kab. Pinrang	Jumlah orang yang mendapatkan layanan Rujukan kewenangan kabupaten / kota	10 orang	0	Pemberian Layanan Rujukan	Kab. Pinrang	Jumlah orang yang mendapatkan layanan Rujukan kewenangan kabupaten / kota	10 orang	18.000.000	
	<b>Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Diluar Panti Sosial</b>		Persentase kegiatan rehabilitasi sosial yang dilaksanakan			<b>Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Diluar Panti Sosial</b>		Persentase kegiatan rehabilitasi sosial yang dilaksanakan			
	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Kab. Pinrang	Persentase layanan data dan pengaduan yang terlaksana	12 kecamatan	7.400.000	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Kab. Pinrang	Persentase layanan data dan pengaduan yang terlaksana	12 kecamatan	10.000.000	
	Pemberian Layanan Kedaruratan	Kab. Pinrang	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kedaruratan kewenangan kabupaten/kota	12 kecamatan	0	Pemberian Layanan Kedaruratan	Kab. Pinrang	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kedaruratan kewenangan kabupaten/ kota	12 kecamatan	20.000.000	
	Penyediaan Permakanan	Kab. Pinrang	Persentase penyediaan permakanan	100 %	31.270.000	Penyediaan Permakanan	Kab. Pinrang	Jumlah orang yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan permakanan sesuai dengan standar gizi minimal kewenangan kabupaten/kota	100 orang	60.000.000	
	Penyediaan Sandang	Kab. Pinrang	Jumlah orang yang menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang tersedia dalam 1 tahun kewenangan kabupaten/kota	50 orang	0	Penyediaan Sandang	Kab. Pinrang	Jumlah orang yang menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang tersedia dalam 1 tahun kewenangan kabupaten/kota	50 orang	50.000.000	

	Penyediaan Alat Bantu	Kab. Pinrang	Jumlah orang yang mendapatkan alat bantu dan alat bantu peraga sesuai kebutuhan kewenangan kabupaten/kota	5 orang	0	Penyediaan Alat Bantu	Kab. Pinrang	Jumlah orang yang mendapatkan alat bantu dan alat bantu peraga sesuai kebutuhan kewenangan kabupaten/kota	5 orang	15.000.000	
	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	Kab. Pinrang	Jumlah orang yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan perbekalan kesehatan diluar panti kewenangan kabupaten/kota	15 orang	0	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	Kab. Pinrang	Jumlah orang yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan perbekalan kesehatan diluar panti kewenangan kabupaten/kota	15 orang	15.000.000	
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Kab. Pinrang	Jumlah peserta bimbingan fisik, mental, spritual dan sosial kewenangan kabupaten/kota	100 orang	0	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Kab. Pinrang	Jumlah peserta bimbingan fisik, mental, spritual dan sosial kewenangan kabupaten/kota	100 orang	5.000.000	
	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Kab. Pinrang	Jumlah peserta dalam pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA kewenangan kabupaten/kota	100 orang	0	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Kab. Pinrang	Jumlah peserta dalam pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA kewenangan kabupaten/kota	100 orang	10.000.000	
	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan Kartu Identitas Anak	Kab. Pinrang	Jumlah orang yang membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan Kartu Identitas Anak bagi penyandang masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA kewenangan kabupaten/kota	50 orang	0	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan Kartu Identitas Anak	Kab. Pinrang	Jumlah orang yang membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan Kartu Identitas Anak bagi penyandang masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	50 orang	2.600.000	

								kewenangan kabupaten/kota			
	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Kab. Pinrang	Jumlah orang yang mendapatkan akses kelayanan pendidikan dan kesehatan dasar kewenangan kabupaten/kota	12 kecamatan	0	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Kab. Pinrang	Jumlah orang yang mendapatkan akses kelayanan pendidikan dan kesehatan dasar kewenangan kabupaten/kota	12 kecamatan	2.500.000	
	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Kab. Pinrang	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga kewenangan kabupaten/kota	5 orang	0	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Kab. Pinrang	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga kewenangan kabupaten/kota	5 orang	15.000.000	
	Pemberian Layanan Rujukan	Kab. Pinrang	Persentase pemberian layanan rujukan yang terlaksana	100%	10.285.000	Pemberian Layanan Rujukan	Kab. Pinrang	Jumlah orang yang mendapatkan layanan rujukan kewenangan kabupaten/kota	12 kecamatan	17.185.000	
	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Kab. Pinrang	Jumlah dokumen kasil koordinasi dan kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial kabupaten/kota	1 dokumen	0	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Kab. Pinrang	Jumlah dokumen kasil koordinasi dan kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial kabupaten/kota	1 dokumen	15.000.000	
	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL</b>		<b>Persentase perlindungan dan jaminan sosial</b>			<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL</b>		<b>Persentase perlindungan dan jaminan sosial</b>			
	<b>Pemeliharaan Anak - Anak Terlantar</b>		Persentase kegiatan pemeliharaan anak - anak terlantar yang terlaksana			<b>Pemeliharaan Anak - Anak Terlantar</b>		Persentase kegiatan pemeliharaan anak - anak terlantar yang terlaksana			
	Penjangkauan Anak - Anak Terlantar	Kab. Pinrang	Persentase penjangkauan anak terlantar yang terlaksana	100%	4.800.000	Penjangkauan Anak - Anak Terlantar	Kab. Pinrang	Jumlah anak - anak terlantar yang dijangkau kewenangan kabupaten/kota	10 orang	7.000.000	
	Rujukan Anak - Anak Terlantar	Kab. Pinrang	Persentase rujukan anak terlantar yang terlaksana	100%	10.450.000	Rujukan Anak - Anak Terlantar	Kab. Pinrang	Jumlah anak - anak terlantar yang mendapatkan rujukan kewenangan kabupaten/kota	10 orang	11.000.000	

	Pemantauan terhadap pelaksanaan pemeliharaan Anak Terlantar	Kab. Pinrang	Persentase pemantauan terhadap pelaksanaan pemeliharaan anak terlantar yang terlaksana	100%	4.060.000	Pemantauan terhadap pelaksanaan pemeliharaan Anak Terlantar	Kab. Pinrang	Jumlah anak terlantar yang terpantau dan terpelihara kewenangan kabupaten/kota	10 orang	10.000.000	
	<b>Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten / Kota</b>		Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Kecakupan Daerah Kabupaten / Kota			<b>Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten / Kota</b>		Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Kecakupan Daerah Kabupaten / Kota			
	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten / Kota	Kab. Pinrang	jumlah Jasa Operator SIKS-NG yang terbayarkan tepat waktu	5 Jasa	39.240.000	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten / Kota	Kab. Pinrang	Jumlah fakir miskin cakupan daerah kabupaten / kota yang didata	12 kecamatan	10.000.000	
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten / Kota	Kab. Pinrang	Jumlah jasa tenaga pendamping keluarga harapan yang terbayarkan tepat waktu	36 Jasa	180.760.000	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten / Kota	Kab. Pinrang	Jumlah keluarga yang mendapatkan pengentasan fakir miskin kabupaten / kota	5 keluarga	10.000.000	
	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Kab. Pinrang	Jumlah keluarga penerima manfaat (KPM) yang mendapatkan bantuan sosial kesejahteraan keluarga kewenangan kabupaten / kota	10 keluarga	0	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Kab. Pinrang	Jumlah keluarga penerima manfaat (KPM) yang mendapatkan bantuan sosial kesejahteraan keluarga kewenangan kabupaten / kota	10 keluarga	20.000.000	
	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Kab. Pinrang	Jumlah orang mendapatkan bantuan pengembangan ekonomi masyarakat kewenangan kabupaten / kota	5 orang	0	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Kab. Pinrang	Jumlah orang mendapatkan bantuan pengembangan ekonomi masyarakat kewenangan kabupaten / kota	5 orang	20.000.000	

	<b>PROGRAM PENANGANAN BENCANA</b>		<b>Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang Terpenuhi Kebutuhannya pada saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah Kabupaten / Kota</b>			<b>PROGRAM PENANGANAN BENCANA</b>		<b>Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang Terpenuhi Kebutuhannya pada saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah Kabupaten / Kota</b>			
	<b>Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten / Kota</b>		Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang Terpenuhi Kebutuhannya pada saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah Kabupaten / Kota			<b>Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten / Kota</b>		Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang Terpenuhi Kebutuhannya pada saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah Kabupaten / Kota			
	Penyediaan Makanan	Kab. Pinrang	Jumlah pemberian bahan makanan korban bencana alam dan bencana sosial yang terlaksana	50 Paket	57.090.000	Penyediaan Makanan	Kab. Pinrang	Jumlah orang yang mendapatkan permakanan 3x1 hari dalam masa tanggap darurat (Pengungsian) kewenangan kabupaten / kota	50 orang	36.400.000	
	Penyediaan Sandang	Kab. Pinrang	Jumlah penyediaan Sandang bagi korban bencana alam dan bencana sosial yang terlaksana	50 Paket	57.744.000	Penyediaan Sandang	Kab. Pinrang	Jumlah orang yang mendapatkan pakaian dan kelengkapan lainnya yang tersedia pada masa tanggap darurat (pengungsian) dan pasca bencana kewenangan kabupaten / kota	50 orang	36.400.000	
	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Kab. Pinrang	Jumlah tempat pengungsian kewenangan kabupaten / kota	1 unit	0	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Kab. Pinrang	Jumlah tempat pengungsian kewenangan kabupaten / kota	1 unit	20.000.000	

	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Kab. Pinrang	Jumlah orang yang mendapatkan penanganan khusus bagi kelompok rentan kewenangan kabupaten / kota	12 kecamatan	0	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Kab. Pinrang	Jumlah orang yang mendapatkan penanganan khusus bagi kelompok rentan kewenangan kabupaten / kota	12 kecamatan	20.000.000	
	Pelayanan Dukungan Psikososial	Kab. Pinrang	Jumlah korban bencana yang mendapatkan layanan psikososial kewenangan kabupaten / kota	100 orang	0	Pelayanan Dukungan Psikososial	Kab. Pinrang	Jumlah korban bencana yang mendapatkan layanan psikososial kewenangan kabupaten / kota	100 orang	10.000.000	
	<b>Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten / Kota</b>		Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang Terpenuhi Kebutuhannya pada saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah Kabupaten / Kota			<b>Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten / Kota</b>		Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang Terpenuhi Kebutuhannya pada saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah Kabupaten / Kota			
	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Kab. Pinrang	Jumlah kampung yang melaksanakan kordinasi, sosialisasi dan pelaksanaan kampung siaga bencana kewenangan kabupaten/kota	1 kampung	0	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Kab. Pinrang	Jumlah kampung yang melaksanakan kordinasi, sosialisasi dan pelaksanaan kampung siaga bencana kewenangan kabupaten/kota	1 kampung	30.000.000	
	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Kab. Pinrang	Persentase taruna siaga bencana yang aktif	45 Orang	112.800.000	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Kab. Pinrang	Jumlah orang yang melaksanakan kordinasi, sosialisasi dan pelaksanaan taruna siaga bencana kewenangan kabupaten/kota	50 orang	130.000.000	

<b>PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN</b>		<b>Persentase Pengelolaan Taman Makam Pahlawan</b>			<b>PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN</b>		<b>Persentase Pengelolaan Taman Makam Pahlawan</b>			
<b>Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten / Kota</b>		<b>Persentase Pelaksanaan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten Kota yang Terlaksana</b>			<b>Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten / Kota</b>		<b>Persentase Pelaksanaan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten Kota yang Terlaksana</b>			
Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten / Kota	Kab. Pinrang	Jumlah dokumen hasil rehabilitasi serta pemeliharaan sarana dan prasarana taman makam pahlawan nasional kabupaten / kota	1 dokumen	0	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten / Kota	Kab. Pinrang	Jumlah dokumen hasil rehabilitasi serta pemeliharaan sarana dan prasarana taman makam pahlawan nasional kabupaten / kota	1 dokumen	100.000.000	
Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten / Kota	Kab. Pinrang	Jumlah jasa petugas pembersih TMP / TMB yang terbayarkan tepat waktu	11 Orang	84.325.000 0	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten / Kota	Kab. Pinrang	Jumlah Makam yang terpenuhi pemeliharaannya pada taman makam pahlawan kabupaten / kota	11 Orang	84.325.000	

## 2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Berikut adalah hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, stake holder dan dari hasil pelaksanaan Forum Renja Dinas Sosial yang telah dilakukan pada tanggal 22 Februari 2022 terdapat usulan :

Tabel T-C.32

### Usulan Program dan Kegiatan dari para Pemangku Kepentingan Tahun 2022 Kabupaten Pinrang

#### Dinas Sosial Kabupaten Pinrang

Usulan Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	2	3	4	5
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL				
Kegiatan: Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis Diluar Panti Sosial				
Sub Kegiatan: Penyediaan Permakanan	Kab. Pinrang	Persentase penyediaan permakanan bagi disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar serta gelandangan pengemis yang dilaksanakan	40 Paket	

## **BAB III**

### **TUJUAN DAN SASARAN DINAS SOSIAL**

#### **3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL**

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial merupakan salah satu prioritas pembangunan nasional sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Dasar 1945 dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial ini merupakan upaya Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat yang terarah, terpadu dan berkelanjutan dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga yang meliputi rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial, dan pemberdayaan sosial.

Dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 dijelaskan tujuan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, yaitu :

1. Meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup;
2. Memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian;
3. Meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial;
4. Meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggung jawab sosial dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara berlembaga dan berkelanjutan.
5. Meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan;
6. Meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial diprioritaskan kepada mereka yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial sebagai berikut :

1. Ketelantaran, yaitu pengabaian / penelantaran anak-anak dan orang lanjut usia karena berbagai sebab atau kondisi tidak terpenuhinya kebutuhan fisik, psikis, dan sosial secara wajar yang disebabkan oleh ketidakmampuan sosial ekonomi, dan pengabaian terhadap tugas dan tanggung jawab;

2. Kecacatan, yaitu hilang / terganggunya fungsi fisik atau kondisi abnormalitas fungsi struktur anatomi psikologi maupun fisiologis;
3. Ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku, yaitu merupakan indikasi atas ketidakberhasilan fungsi sosial seseorang, yakni tergantungnya salah satu atau lebih fungsi yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan fisik, emosi, konsep diri dan juga kebutuhan religious, rekreasi dan pendidikan seseorang atau kondisi penyimpangan atau pelanggaran terhadap nilai dan norma sosial, moral, dan etika yang berlaku di masyarakat.
4. Korban bencana, yaitu perorangan, keluarga atau kelompok masyarakat yang menderita baik secara fisik, mental, maupun sosial ekonomi sebagai akibat dari terjadinya bencana yang menyebabkan mereka mengalami hambatan dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya; dan
5. Korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi, yaitu orang (baik individu, keluarga atau kelompok) yang mengalami tindak kekerasan, baik dalam bentuk penelantaran, perlakuan salah, eksploitasi, diskriminasi dan bentuk-bentuk kekerasan lainnya maupun orang yang berada dalam situasi yang membahayakan dirinya sehingga menyebabkan fungsi sosialnya terganggu.

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Pinrang selaku bagian dari Pemerintah Kabupaten Pinrang meliputi :

1. Rehabilitasi sosial, yaitu proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
2. Perlindungan dan Jaminan sosial, yaitu semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial dan merupakan skema yang melembaga untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
3. Pemberdayaan sosial, yaitu semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan warga masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya

### **3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA DINAS SOSIAL**

Dinas Sosial Kabupaten Pinrang sebagai pilar pemerintah memiliki peran strategis untuk mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh penduduk Kabupaten Pinrang. Hal ini sesuai dengan amanat UUD 1945, Pancasila, Undang-undang Kesejahteraan Sosial dan Perpres No 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara. Peran dan Fungsi Dinas Sosial adalah dalam rangka mewujudkan Visi Misi Bupati Pinrang di bidang sosial yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan pada daerah sesuai dengan visi, misi dan program Bupati sebagaimana dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Berdasarkan misi Bupati dan wakil Bupati yang terpilih, maka yang menjadi tujuan yang harus dicapai oleh Dinas Sosial Kabupaten Pinrang adalah :

1. Mewujudkan pemerintahan berbasis elektronik dalam mendukung sistem birokrasi yang baik dan pelayanan publik yang memuaskan;
2. Meningkatkan kapasitas lembaga sosial kemasyarakatan dalam berperan pada pembangunan dan pembentukan karakter masyarakat;
3. Meningkatkan taraf kehidupan ekonomi masyarakat secara merata;
4. Meningkatkan Perlindungan Masyarakat dari Bencana alam dan Sosial.

Sedangkan Sasaran yang ingin dicapai adalah :

1. Meningkatnya Kinerja dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah;
2. Meningkatnya Pemberdayaan Kelembagaan Sosial;
3. Meningkatnya taraf kehidupan ekonomi masyarakat secara merata;
4. Meningkatnya Perlindungan Masyarakat dari ancaman bencana.

Tabel 3.2

No.	TUJUAN	SASARAN	Indikator Tujuan/ Sasaran	Capaian Tahun 2020	Capaian Tahun 2021
1	Mewujudkan pemerintahan berbasis elektronik dalam mendukung sistem birokrasi yang baik dan pelayanan publik yang memuaskan	Meningkatnya Kinerja dan Akuntabilitas Kinerja	Nilai SAKIP	60,84	60.84
2	Meningkatnya Pemberdayaan Kelembagaan Sosial	Meningkatnya Pemberdayaan Kelembagaan Sosial	Jumlah Rumah Singgah/ Shelter / Tempat Tinggal sementara yang dimiliki sesuai Standar dengan jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar , lanjut usia terlantar dan gepeng	-	1
			Persentase Penyandang cacat disabilitas terlantar anak terlantar , lanjut usia terlantar dan gepeng yang direunifikasi dengan keluarga	-	100%
			Rasio Pekerja Sosial Profesional dan / atau TKS dan / Atau Relawan Sosial yang disediakan	45 Orang	50 Orang
3	Meningkatkan taraf kehidupan ekonomi masyarakat secara merata	Meningkatnya taraf kehidupan ekonomi masyarakat secara merata	Persentase Penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar , lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti ( Indikator SPM)	100%	100%
4	Meningkatnya Perlindungan Masyarakat dari ancaman bencana	Meningkatnya Perlindungan Masyarakat dari ancaman bencana	Persentase Korban Bencana alam dan Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten	100%	100%

### 3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

Mencermati permasalahan dan kondisi sosial yang berkembang saat ini. Dan untuk pencapaian visi dan misi serta strategi dan kebijakan yang ditetapkan oleh Dinas Sosial Kabupaten Pinrang perlu dijabarkan ke dalam berbagai program-program pembangunan kesejahteraan sosial yang bersifat strategis dan prioritas.

Program-program tersebut disusun dan ditetapkan untuk mengakomodir dan menjawab tantangan, persoalan dan kondisi kekinian sekaligus menciptakan peluang positif tahun ke depan . Dengan rencana program/kegiatan prioritas dan indikator kinerja serta rencana pendanaan indikatif sebagaimana terinci pada lampiran rencana strategis ini.

Adapun Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan di Tahun 2023 yaitu sebagai berikut :

A. Program Wajib SKPD, meliputi :

1. Program Pemberdayaan Sosial, meliputi 1 kegiatan dan 2 sub kegiatan
2. Program Penanganan Warga Negara Migran Korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di daerah kabupaten/ kota untuk di pulangkan ke desa/ kelurahan asal, mencakup 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan
3. Program Rehabilitasi Sosial, mencakup 2 kegiatan dan 9 sub kegiatan
4. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial, mencakup 2 kegiatan dan 5 sub kegiatan
5. Program Penanganan Bencana, mencakup 2 kegiatan dan 3 sub kegiatan
6. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan, mencakup 1 Kegiatan dan 1 sub kegiatan

B. Program Pilihan, meliputi :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, mencakup 7 kegiatan dan 27 sub kegiatan.

## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Kegiatan / Sub Kegiatan Merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur dalam suatu program dan terdiri sekupulan tindakan pengerahan sumber daya baik Personil ( Sumber daya Manusia ) , barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana , atau beberapa kombinasidari kesemua jenis sumber daya sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran ( output ) dalam bentuk barang / jasa. Dinas Sosial Kabupaten Pinrang memiliki rencana Program dan Kegiatan Tahun 2023 Sebagai Berikut.

Tabel T-C.33

**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun  
dan Prakiraan Maju Tahun 2023 Kabupaten Pinrang**

**Dinas Sosial Kabupaten Pinrang**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2022 ( Tahun Rencana )				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023				
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
<b>6</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL</b>											
<b>6 01</b>	<b>DINAS SOSIAL KAB.PINRANG</b>											
<b>6</b>	<b>01</b>	<b>01</b>										
				<b>Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota</b>	<b>Persentase kebutuhan layanan administrasi perkantoran yang terpenuhi</b>							
<b>6</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi kinerja perangkat Daerah</b>	<b>Presentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah</b>							
6	01	01	2.01	02	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang tersusun sesuai aturan	Kab. Pinrang	1 Dokumen	3.215.000	DAU		1 Dokumen
6	01	01	2.01	03	Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen perubahan RKA-SKPD yang tersusun sesuai aturan	Kab. Pinrang	1 Dokumen	1.470.000	DAU		1 Dokumen
6	01	01	2.01	04	Koordinasi dan penyusunan dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang tersusun sesuai aturan	Kab. Pinrang	1 Dokumen	1.470.000	DAU		1 Dokumen
6	01	01	2.01	05	Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen perubahan DP A-SKPD yang tersusun sesuai aturan	Kab. Pinrang	1 Dokumen	1.470.000	DAU		1 Dokumen
6	01	01	2.01	06	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang tersusun sesuai aturan	Kab. Pinrang	1 Laporan	5.880.000	DAU		1 Laporan

6	01	01	2.01	07	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Dokumen RENJA dan RENSTRA yang Tersusun	Kab. Pinrang	1 Dokumen	1.400.000	DAU		1 Dokumen	
<b>6</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>2.02</b>		<b>Administrasi keuangan perangkat daerah</b>								
6	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN	Jumlah gaji ASN yang terbayarkan secara tepat waktu	Kab. Pinrang	12 Bulan	2.460.409.349	DAU		12 Bulan	
6	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi pelaksanaan tugas ASN	Jumlah Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN yang terlaksana	Kab. Pinrang	100%	72.135.000	DAU		100%	
6	01	01	2.02	03	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Jumlah Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan yang terbayarkan tepat waktu	Kab. Pinrang	12 Bulan	168.940.000	DAU		12 Bulan	
6	01	01	2.02	05	Koordinasi penyusunan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang tersusun tepat waktu	Kab. Pinrang	1 Laporan	3.020.000	DAU		1 Laporan	
6	01	01	2.02	07	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan /semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan semesteran yang tersusun tepat waktu	Kab. Pinrang	2 Laporan	2.810.000	DAU		2 Laporan	
<b>6</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>2.03</b>		<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada perangkat daerah</b>								
6	01	01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Aset yang tersusun	Kab. Pinrang	2 Laporan	12.075.000	DAU		2 Laporan	
<b>6</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>2.05</b>		<b>Administrasi kepegawaian perangkat daerah</b>								
6	01	01	2.05	03	Pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	Jumlah Laporan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian yang dibuat	Kab. Pinrang	7 Laporan	21.100.000	DAU		7 Laporan	

6	01	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek dan implementasi peraturan perundang-undangan sesuai analisa kebutuhan	Kab. Pinrang	10 Orang	98.000.000	DAU		10 Orang	
<b>6</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>2.06</b>		<b>Administrasi umum perangkat Daerah</b>								
6	01	01	2.06	01	Penyediaan komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor	Jumlah bangunan kantor yang komponen instalasi listrik/penerangannya tersedia secara optimal	Kab. Pinrang	1 Unit	7.500.000	DAU		1 Unit	
6	01	01	2.06	02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah alat kelengkapan kantor yang diadakan sesuai analisa kebutuhan	Kab. Pinrang	3 Unit	108.500.000	DAU		3 Unit	
6	01	01	2.06	05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan yang diadakan sesuai kebutuhan	Kab. Pinrang	1 Paket	3.750.000	DAU		1 Paket	
6	01	01	2.06	06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Peraturan Perundang-undangan yang tersedia sesuai analisa kebutuhan	Kab. Pinrang	10 Surat Kabar	8.700.000	DAU		10 Surat Kabar	
6	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah kegiatan yang terkoordinasikan sesuai analisa kebutuhan	Kab. Pinrang	20 Kegiatan	150.000.000	DAU		20 Kegiatan	
<b>6</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>2.08</b>		<b>Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah</b>								
6	01	01	2.08	02	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Jumlah rekening layanan internet, telepon dan listrik yang terbayarkan tepat waktu	Kab. Pinrang	12 Rekening	66.252.000	DAU		12 Rekening	
6	01	01	2.08	04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah jasa kebersihan kantor yang tersedia dan terbayarkan tepat waktu	Kab. Pinrang	6 Orang	32.370.000	DAU		6 Orang	

6	01	01	2.09		<b>Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah</b>								
6	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas jabatan	Jumlah Kendaraan dinas operasional yang dipelihara sesuai analisa kebutuhan	Kab. Pinrang	10 Unit	65.155.000	DAU		10 Unit	
6	01	01	2.09	06	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara sesuai analisa kebutuhan	Kab. Pinrang	6 Unit	6.100.000	DAU		6 Unit	
6	02	02			<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL</b>	<b>Cakupan Tenaga Kesejahteraan Sosial yang dibina</b>							
6	01	02	03		<b>Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten / Kota</b>	Cakupan Tenaga Kesejahteraan Sosial yang dibina							
6	01	02	03	02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Tenaga Kesejahteraan yang potensinya dikembangkan	Kab. Pinrang	12 Orang	129.356.000	DAU		12 Orang	
6	04	02			<b>PROGRAM REHABILITASI SOSIAL</b>	<b>Persentase Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial</b>							
6	04	02	01		<b>Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis Diluar Panti Sosial</b>								

6	04	02	01	01	Penyediaan Permakanan	Persentase penyediaan permakanan bagi disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar serta gelandangan pengemis yang dilaksanakan	Kab. Pinrang	40 Paket	35.182.000	DAU		40 Paket	
6	04	02	01	02	Penyediaan Sandang	Persentase penyediaan sandang bagi disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar serta gelandangan pengemis yang dilaksanakan	Kab. Pinrang	35 Paket	29.090.000	DAU		35 Paket	
6	04	02	01	03	Penyediaan Alat Bantu	Persentase penyediaan alat bantu bagi disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar serta gelandangan pengemis yang dilaksanakan	Kab. Pinrang	4 Paket	54.825.000	DAU		4 Paket	
6	04	02	01	04	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Persentase Pelayanan Penelusuran Keluarga yang terlaksana	Kab. Pinrang	100%	10.010.000	DAU		100%	
6	04	02	02		<b>Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Diluar Panti Sosial</b>	Persentase kegiatan rehabilitasi sosial yang dilaksanakan							
6	04	02	02	01	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Persentase layanan data dan pengaduan yang terlaksana	Kab. Pinrang	100%	7.400.000	DAU		100%	
6	04	02	02	03	Penyediaan Permakanan	Persentase penyediaan permakanan	Kab. Pinrang	100%	31.270.000	DAU		100%	
6	04	02	02	13	Pemberian Layanan Rujukan	Persentase pemberian layanan rujukan yang terlaksana	Kab. Pinrang	100%	10.285.000	DAU		100%	

6	05	02			<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL</b>	<b>Persentase perlindungan dan jaminan sosial</b>							
6	05	02	01		<b>Pemeliharaan Anak - Anak Terlantar</b>	Persentase kegiatan pemeliharaan anak - anak terlantar yang terlaksana							
6	05	02	01	01	Penjangkauan Anak - Anak Terlantar	Persentase penjangkauan anak terlantar yang terlaksana	Kab. Pinrang	100%	4.800.000	DAU		100%	
6	04	02	01	02	Rujukan Anak - Anak Terlantar	Persentase rujukan anak terlantar yang terlaksana	Kab. Pinrang	100%	10.450.000	DAU		100%	
6	04	02	01	03	Pemantauan terhadap pelaksanaan pemeliharaan Anak Terlantar	Persentase pemantauan terhadap pelaksanaan pemeliharaan anak terlantar yang terlaksana	Kab. Pinrang	100%	4.060.000	DAU		100%	
6	05	02	02		<b>Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten / Kota</b>	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Kecakupan Daerah Kabupaten / Kota							
6	05	02	02	01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten / Kota	jumlah pendataan fakir miskin cakupan daerah kabupaten / kota yang terlaksana	Kab. Pinrang	5 Jasa	39.240.000	DAU		5 Jasa	
6	05	02	02	02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah jasa tenaga pendamping keluarga harapan yang terbayarkan tepat waktu	Kab. Pinrang	36 Jasa	180.760.000	DAU		36 Jasa	
6	06	02			<b>PROGRAM PENANGANAN BENCANA</b>	<b>Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang Terpenuhi Kebutuhannya pada saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah Kabupaten / Kota</b>							

6	06	02	01		<b>Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten / Kota</b>	Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya pada saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah Kabupaten / Kota							
6	06	02	01	01	Penyediaan Makanan	Jumlah pemberian bahan makanan korban bencana alam dan bencana sosial yang terlaksana	Kab. Pinrang	50 Paket	57.090.000	DAU		50 Paket	
6	06	02	01	02	Penyediaan Sandang	Jumlah penyediaan Sandang bagi korban bencana alam dan bencana sosial yang terlaksana	Kab. Pinrang	50 Pake	57.744.000	DAU		50 Paket	
6	06	02	02		<b>Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten / Kota</b>	Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya pada saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah Kabupaten / Kota							
6	06	02	02	02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Persentase taruna siaga bencana yang aktif	Kab. Pinrang	45 Orang	112.800.000	DAU		45 Orang	
<b>6</b>	<b>07</b>	<b>02</b>			<b>PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN</b>	<b>Persentase Pengelolaan Taman Makam Pahlawan</b>							
6	07	02	01		<b>Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten / Kota</b>	Persentase Pelaksanaan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten Kota yang Terlaksana							
6	07	02	01	01	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten / Kota	Jumlah jasa petugas pembersih TMP / TMB yang terbayarkan tepat waktu	Kab. Pinrang	11 Orang	84.325.000	DAU		11 Orang	

## **BAB V PENUTUP**

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) merupakan satu dokumen rencana resmi daerah yang memberikan masukan utama dan mendasar bagi perencanaan di peringkat yang lebih atas seperti RKPD, Renstra OPD, RPJMD dan bahkan RPJPD. Renja OPD berhubungan langsung dengan pelayanan kepada masyarakat yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kualitas penyusunan Renja OPD dengan demikian akan sangat menentukan kualitas pelayanan OPD yang diberikan kepada masyarakat penggunanya.

Rencana Kerja yang telah tersusun ini tidak dapat semata-mata dijadikan sebuah komitmen, tetapi sangat penting sebagai pedoman dan acuan kerja bagi seluruh unsur Dinas Sosial Kabupaten Pinrang dalam mewujudkan pencapaian Visi dan Misi Dinas. Renja Dinas Sosial Tahun 2023 disusun dengan menerjemahkan serta mengoperasionalkan RKPD Kabupaten Pinrang Tahun 2023 ke dalam program dan kegiatan selama satu tahun ke depan karena program dan kegiatan yang telah disusun dalam dokumen Renja Dinas Sosial berkontribusi kepada pencapaian tujuan dan capaian program RKPD Kabupaten Pinrang secara keseluruhan dan tujuan strategis jangka menengah yang tercantum dalam Perubahan Renstra Dinas Sosial Tahun 2019-2023.

Sehubungan dengan hal tersebut maka perlu diperhatikan kaidah pelaksanaan berikut ini:

1. Rencana Kerja Dinas Sosial Tahun 2023 memberikan arahan program dan kegiatan pelayanan Dinas khususnya dan pembangunan tahunan daerah pada umumnya selama Tahun Anggaran 2023.
2. Dinas Sosial Kabupaten Pinrang berkewajiban untuk mengimplementasikan Rencana Kerja Dinas Sosial Tahun Anggaran 2023.
3. Penguatan peran stakeholders perlu dilakukan untuk mendukung pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Sosial Tahun 2023. Penguatan peran stakeholders ini dapat dilakukan antara lain melalui proses sosialisasi, baik kepada masyarakat luas maupun perusahaan-perusahaan serta seluruh komponen aparatur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pinrang.

4. Rencana Kerja Dinas Sosial Tahun 2023 ini juga digunakan sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan kinerja tahunan Dinas Sosial. Pada akhirnya, Rencana Kerja ini diharapkan mampu memberikan gambaran isu-isu strategis yang dihadapi oleh Dinas Sosial di Tahun 2022 serta upaya-upaya yang akan dilakukan untuk mengantisipasi dan mengatasi hal tersebut.

Pinrang, 29 Juli 2022

  
Kepala Dinas Sosial  
**RUSLI, S.Sos**  
Pangkat : Pembina Tk.I  
NIP : 19651231 198903 1 109